



BAB VI

PENUTUP

Selama 5 (lima) tahun Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2010 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan.

Beberapa kebijakan, program, kegiatan telah berhasil dan dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mencapai 77,24 pada tahun 2008. Nilai tersebut menempatkan posisi IPM Kabupaten Sleman pada peringkat 15 dari 477 kabupaten/kota. Selain itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman mendapat apresiasi baik di tingkat Nasional maupun provinsi, antara lain Manggala Karya Bakti Husada dari Menteri Kesehatan RI serta berbagai prestasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2005–2010 diarahkan pada upaya pencapaian misi menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan sistem



pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pendidikan dan kesehatan antara lain dengan pemenuhan standar ISO di bidang kesehatan, penataan kepegawaian dengan sistem pola karier berdasarkan kompetensi dan prestasi, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel serta pengembangan sistem pengawasan pengendalian ietrnal.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat dilakukan antara lain melalui strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha dan investasi, dan revitalisasi pertanian. Dalam bidang pembangunan pertanian berhasil mempertahankan surplus beras, peningkatan populasi ternak sehingga berhasil memperoleh beberapa penghargaan juara pertama ketahanan pangan. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan perekonomian, meskipun sempat mengalami penurunan pasca gempa tahun 2006, sampai akhir tahun 2009 dapat mengembalikan bahkan meningkatkan potensi dan hasil sektor ini. Sektor perindustrian dan perdagangan yang didominasi oleh insutri rumah tangga menjadi perhatian pemerintah daerah melalui program-program untuk sasaran menengah ke bawah, terutama untuk mengatasi dampak krisis ekonomi.

Guna mendukung pencapaian kualitas hidup dan kehidupan masyarakat ditempuh berbagai program dalam berbagai sektor urusan. Kualitas kehidupan masyarakat salah satu indikator secara yang dapat diukur dari Indek Pembangunan Mausia (IPM). IPM yang telah diukur dari tahun 2005 hingga tahun 2008, selalu meningkat dari 75,57 menjadi 77,24, yang secara nasional capaian tersebut untuk tingkat kabupaten selalu berada diurutan atas. Selain itu upaya menjaga perekonomian masyarakat diupayakan tetap terjaganya stabilitas situasi dan kondisi yang dinamis. Program-program penjagaan ketentraman dan ketertiban diupayakan melalui pengembangan dteksi dini dan cegah dini, penjagaan kerukunan umat beragama dan peningkatan koordinasi dengan aparat terkait.



Sampai dengan tahun 2009, terdapat beberapa urusan dalam pelaksanaannya kurang optimal antara lain disebabkan oleh masih dirasakannya dampak krisis ekonomi global dan terjadinya gempa bumi tahun 2006. Faktor ini menyebabkan beberapa target kegiatan dan program tidak tercapai dan beberapa capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, antara lain terjadinya penurunan volume dan nilai ekspor. Sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,13 menjadi 4,53.

Kendala dan permasalahan yang juga dirasakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masih adanya ketidakjelasan pengelolaan urusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Disamping itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang ambivalen, kontradiktif, dan tidak jelas serta sering berubah-ubah. Namun demikian pada masa mendatang diupayakan untuk terus memantapkan fundamen yang telah diletakkan pada masa sebelumnya, menggali potensi-potensi yang ada, memanfaatkan peluang dan tantangan serta mengurangi kemungkinan ancaman yang muncul.

Pada masa-masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.